



## Etika Kristen tentang Perceraian: Analisis Teologi dan Implikasinya bagi Pelayanan Keluarga di Konteks Ketapang, Kalimantan Barat

Mispan<sup>1\*</sup>, Hapyvania Tenda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta, Indonesia

Email: [mispanke1@gmail.com](mailto:mispanke1@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hapyvania@sttikat.ac.id](mailto:hapyvania@sttikat.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [mispanke1@gmail.com](mailto:mispanke1@gmail.com)

**Abstract.** *Divorce has become an increasingly common reality in Christian family life and poses serious challenges for the church in carrying out pastoral family ministry. Theologically, divorce stands in tension with Christian ethics, which views marriage as a sacred and covenantal institution established by God. This article aims to analyze Christian ethics regarding divorce from a biblical theological perspective and to examine its implications for family ministry within the context of Ketapang, West Kalimantan. This study employs a qualitative research method with a theological-normative and contextual approach through a literature review of biblical texts, theological books, and scholarly journals. The findings indicate that Scripture affirms marriage as God's ideal will, while divorce is understood as a consequence of human sinfulness and relational brokenness. In the context of Ketapang, social, economic, and cultural factors contribute significantly to the vulnerability of families to divorce. Therefore, the church is called to develop a contextual family ministry that not only upholds Christian ethical norms but also embodies love, justice, forgiveness, and restoration for broken families. This article emphasizes that Christian ethics concerning divorce must be practiced pastorally and transformatively within the life of the local church.*

**Keywords:** *Christian Ethics; Divorce; Family Ministry; Local Church; Marriage.*

**Abstrak.** Perceraian merupakan realitas yang semakin sering terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen dan menimbulkan tantangan serius bagi gereja dalam menjalankan pelayanan pastoral keluarga. Secara teologis, perceraian berhadapan langsung dengan etika Kristen yang memandang pernikahan sebagai lembaga ilahi yang kudus dan bersifat perjanjian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis etika Kristen tentang perceraian dari perspektif teologi Alkitab serta mengkaji implikasinya bagi pelayanan keluarga dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan kontekstual melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber Alkitab, buku teologi, dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Alkitab menegaskan ideal pernikahan sebagai kehendak Allah, sementara perceraian dipahami sebagai konsekuensi dari dosa dan keretakan relasi manusia. Dalam konteks Ketapang, faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi meningkatnya kerentanan keluarga terhadap perceraian. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk mengembangkan pelayanan keluarga yang kontekstual, yang tidak hanya menegaskan norma etika Kristen, tetapi juga menghadirkan kasih, keadilan, pengampunan, dan pemulihan bagi keluarga yang terluka. Artikel ini menegaskan bahwa etika Kristen tentang perceraian harus diwujudkan secara pastoral dan transformatif dalam kehidupan gereja lokal.

**Kata Kunci:** Etika Kristen; Gereja Lokal; Pelayanan Keluarga; Perceraian; Pernikahan.

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam iman Kristen dipahami bukan sekadar kontrak sosial, melainkan suatu perjanjian kudus yang ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia. Alkitab menegaskan bahwa pernikahan merupakan karya Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi “satu daging” sebagai refleksi relasi kasih dan kesetiaan ilahi (Kej. 2:24). Oleh karena itu, pernikahan memiliki dimensi teologis, etis, dan spiritual yang mendalam, yang menuntut komitmen, tanggung jawab, dan kesetiaan seumur hidup. Dalam perspektif ini, perceraian dipandang sebagai realitas yang bertentangan dengan maksud awal Allah atas pernikahan, sekalipun Alkitab juga mencatat keberadaannya sebagai fenomena yang muncul akibat kerasnya hati manusia (Hays, 1996).

Dalam tradisi teologi Kristen, Yesus secara tegas menempatkan pernikahan sebagai relasi yang tidak mudah diputuskan. Ajaran Yesus dalam Injil-injil Sinoptik menunjukkan penegasan kembali terhadap maksud penciptaan Allah, sekaligus kritik terhadap praktik perceraian yang disalahgunakan dalam konteks hukum Yahudi (Mat. 19:3–9). Namun demikian, realitas pastoral menunjukkan bahwa perceraian tetap terjadi bahkan di tengah komunitas Kristen. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma teologis yang ideal dan kenyataan hidup umat, sehingga gereja dihadapkan pada tantangan etis dan pastoral yang kompleks dalam merespons perceraian secara bertanggung jawab (Instone-Brewer, 2003; Wright, 2004).

Di Indonesia, perceraian bukan hanya persoalan hukum atau sosial, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual kehidupan berjemaat. Beberapa kajian menunjukkan bahwa meningkatnya angka perceraian di kalangan keluarga Kristen dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik relasi, kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya pembinaan pranikah dan pascanikah di gereja (Borrong, 2015). Situasi ini memperlihatkan bahwa gereja tidak cukup hanya menyampaikan doktrin tentang kesucian pernikahan, tetapi juga perlu mengembangkan pendekatan etika Kristen yang kontekstual dan relevan dengan realitas umat.

Etika Kristen sendiri tidak berdiri terlepas dari konteks kehidupan manusia. Etika Kristen bersifat normatif sekaligus inkarnasional, yakni berakar pada kehendak Allah dan Firman-Nya, namun diterapkan dalam situasi konkret kehidupan manusia yang sarat dengan pergumulan dan keterbatasan (Borrong, 2006; Verkuyl, 2011). Oleh sebab itu, refleksi etis tentang perceraian menuntut pendekatan teologis yang tidak hanya menegaskan prinsip kebenaran, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kasih, keadilan, pengampunan, dan pemulihan dalam pelayanan gereja.

Konteks Ketapang, Kalimantan Barat, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, termasuk pengaruh adat, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta dinamika relasi keluarga dalam masyarakat lokal. Faktor-faktor tersebut turut membentuk cara keluarga Kristen memahami pernikahan, konflik rumah tangga, dan perceraian. Tanpa pemahaman kontekstual yang memadai, gereja berisiko menerapkan pendekatan etika yang normatif tetapi kurang pastoral, atau sebaliknya, pastoral tetapi kehilangan dasar teologis yang kokoh (Bevans, 2002).

Dalam pelayanan keluarga, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang memelihara kekudusan pernikahan sekaligus menghadirkan kasih Allah bagi mereka yang terluka oleh kegagalan relasi. Pelayanan keluarga Kristen tidak hanya bertujuan mencegah perceraian, tetapi juga mendampingi, memulihkan, dan membimbing keluarga agar tetap hidup dalam terang kehendak Allah. Pendekatan ini menuntut kerangka etika Kristen yang seimbang antara kebenaran dan kasih, antara norma teologis dan realitas pastoral (Susabda, 2011; Stott, 1997).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang etika Kristen mengenai perceraian menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pelayanan keluarga di Ketapang, Kalimantan Barat. Penelitian ini berupaya menganalisis secara teologis pandangan Kristen tentang perceraian serta merumuskan implikasinya bagi pelayanan keluarga yang kontekstual dan transformatif. Dengan menggunakan pendekatan teologis-normatif dan kontekstual melalui studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan etika Kristen sekaligus kontribusi praktis bagi gereja dalam menjalankan panggilannya di tengah realitas keluarga yang kompleks (Grenz, 2011).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis-normatif dan kontekstual melalui studi kepustakaan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan secara mendalam makna etika Kristen tentang perceraian berdasarkan Alkitab dan tradisi teologi, bukan untuk mengukur fenomena secara statistik. Pendekatan teologis-normatif menempatkan Kitab Suci dan pemikiran teolog Kristen sebagai dasar utama dalam merumuskan prinsip etika yang bersifat normatif, sehingga perceraian dianalisis dalam terang kehendak Allah dan panggilan moral gereja (Creswell, 2014; Grenz, 2011). Selain itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk mengaitkan prinsip etika Kristen tersebut dengan realitas sosial dan budaya pelayanan keluarga di Ketapang, Kalimantan Barat. Pendekatan ini menegaskan bahwa refleksi etika Kristen harus berdialog dengan konteks konkret kehidupan umat agar relevan dan aplikatif dalam pelayanan gereja. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Alkitab, buku teologi dan etika Kristen, serta jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan reflektif-etis untuk merumuskan implikasi praktis bagi pelayanan keluarga Kristen (Bevans, 2002; Sugiyono, 2017).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Etika Kristen dalam Perspektif Teologi Alkitab**

Etika Kristen merupakan cabang refleksi teologis yang membahas bagaimana kehendak Allah dinyatakan dan diwujudkan dalam kehidupan moral umat percaya. Etika Kristen tidak hanya berkaitan dengan penilaian benar atau salah secara normatif, tetapi berakar pada relasi manusia dengan Allah yang hidup dan menyelamatkan. Oleh karena itu, etika Kristen bersifat teosentris, yakni menempatkan Allah sebagai sumber, standar, dan tujuan dari seluruh tindakan moral manusia. Dalam konteks ini, etika Kristen tidak dapat dilepaskan dari wahyu Allah dalam Alkitab, yang menjadi dasar utama bagi pembentukan nilai, sikap, dan tindakan orang percaya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan pernikahan dan keluarga (Grenz, 2011).

Pengertian etika Kristen secara mendasar menunjuk pada respons manusia terhadap anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Etika Kristen bukanlah usaha manusia untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik, melainkan buah dari kehidupan yang telah diperbarui oleh karya penebusan Kristus. Dengan demikian, ketaatan moral dalam etika Kristen lahir dari relasi perjanjian antara Allah dan umat-Nya, bukan dari kewajiban legalistik semata. Dalam perspektif ini, kehidupan etis orang Kristen merupakan perwujudan iman yang hidup, di mana kasih kepada Allah diwujudkan dalam kasih kepada sesama, khususnya dalam relasi-relasi yang paling mendasar seperti keluarga (Stott, 1997).

Dasar etika Kristen dalam Alkitab secara eksplisit terlihat sejak kisah penciptaan. Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*), yang mengandung implikasi etis bahwa setiap aspek kehidupan manusia harus mencerminkan karakter Allah yang kudus, setia, dan penuh kasih. Pernikahan, sebagai lembaga pertama yang ditetapkan Allah, ditempatkan dalam kerangka penciptaan tersebut, di mana relasi suami dan istri dipanggil untuk mencerminkan kesatuan, kesetiaan, dan tanggung jawab yang saling membangun (Kej. 2:18–24). Dengan demikian, etika Kristen tentang pernikahan dan keluarga tidak bersifat opsional, melainkan merupakan bagian integral dari maksud Allah sejak awal (Verkuyl, 2011).

Dalam Perjanjian Baru, dasar etika Kristen semakin diperdalam melalui kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Yesus menegaskan kembali kekudusan pernikahan dengan merujuk pada kehendak Allah sejak penciptaan, sekaligus menyingkapkan bahwa penyimpangan terhadap maksud tersebut, termasuk perceraian, berkaitan dengan kerasnya hati manusia

(Mat. 19:8). Ajaran Yesus ini menunjukkan bahwa etika Kristen tidak hanya menekankan ketaatan eksternal terhadap hukum, tetapi menuntut pembaruan hati sebagai pusat kehidupan moral. Oleh karena itu, etika Kristen bersifat transformasional, mengarahkan manusia kepada pemulihan relasi dengan Allah dan sesama (Hays, 1996).

Prinsip moral Kristen terkait pernikahan dan keluarga secara teologis bertumpu pada kasih (*agape*), kesetiaan (*faithfulness*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Kasih Kristen bukan sekadar perasaan, melainkan komitmen untuk mengupayakan kebaikan pasangan dan anggota keluarga sebagai sesama yang diciptakan menurut gambar Allah. Kesetiaan dalam pernikahan mencerminkan kesetiaan Allah terhadap perjanjian-Nya dengan umat manusia, sehingga perceraian dipahami bukan hanya sebagai kegagalan relasi horizontal, tetapi juga sebagai luka terhadap makna perjanjian itu sendiri. Sementara itu, tanggung jawab moral dalam keluarga mencakup panggilan untuk saling melayani, mengampuni, dan membangun satu sama lain dalam kasih Kristus (Grenz, 2011).

Dalam konteks etika Kristen, pernikahan dipahami sebagai ruang praksis iman, di mana nilai-nilai Injil diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Relasi suami-istri dan orang tua-anak menjadi medan konkret bagi penghayatan etika kasih, pengorbanan, dan kesabaran. Oleh sebab itu, persoalan perceraian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan pribadi, tetapi sebagai isu etis dan teologis yang berdampak luas bagi kesaksian gereja dan kehidupan komunitas iman. Gereja, sebagai komunitas etis, dipanggil untuk menjaga integritas ajaran Alkitab sekaligus menghadirkan kasih karunia Allah bagi keluarga yang mengalami kegagalan relasi (Stott, 1997).

Dengan demikian, konsep etika Kristen dalam perspektif teologi Alkitab menegaskan bahwa pernikahan dan keluarga merupakan bagian dari rencana Allah yang kudus dan bermakna. Etika Kristen memberikan kerangka normatif untuk memahami ideal ilahi tentang pernikahan, sekaligus menjadi dasar refleksi pastoral dalam menghadapi realitas perceraian. Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai analisis teologis perceraian dan implikasinya bagi pelayanan keluarga Kristen, khususnya dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat, yang memiliki dinamika sosial dan budaya tersendiri (Verkuyl, 2011; Hays, 1996).

## **Perceraian dalam Perspektif Alkitab dan Tradisi Gereja**

Perceraian dalam perspektif Alkitab merupakan realitas yang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman teologis tentang pernikahan sebagai perjanjian yang ditetapkan Allah. Alkitab tidak menempatkan perceraian sebagai ideal ilahi, melainkan sebagai fenomena yang muncul akibat keretakan relasi manusia dengan Allah dan sesamanya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perceraian harus dimulai dari kerangka teologi perjanjian, di mana pernikahan dipahami sebagai ikatan yang kudus, mengikat, dan bermakna teologis, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru (Hays, 1996).

Dalam Perjanjian Lama, perceraian diakui sebagai praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, namun bukan tanpa batasan. Ulangan 24:1–4 sering dijadikan dasar normatif bagi praktik perceraian, di mana Musa mengatur prosedur pemberian surat cerai. Namun, teks ini lebih bersifat regulatif daripada preskriptif, artinya Musa tidak mendorong perceraian, melainkan mengatur realitas yang sudah ada untuk mencegah ketidakadilan terhadap perempuan. Dengan demikian, perceraian dalam Perjanjian Lama harus dipahami sebagai bentuk kompromi pastoral terhadap kondisi kerasnya hati manusia, bukan sebagai kehendak ideal Allah atas pernikahan (Verkuyl, 2011).

Lebih jauh, para nabi Perjanjian Lama justru menggunakan metafora pernikahan untuk menggambarkan relasi perjanjian antara Allah dan Israel. Allah digambarkan sebagai suami yang setia, sementara Israel sering kali dilukiskan sebagai istri yang tidak setia. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai simbol pengkhianatan terhadap perjanjian, yang melukai relasi kasih dan kesetiaan. Maleakhi 2:16 secara eksplisit menyatakan kebencian Allah terhadap perceraian, karena tindakan tersebut merusak ikatan perjanjian dan menindas pihak yang lemah. Perspektif profetik ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki dimensi etis dan spiritual yang melampaui sekadar hubungan legal atau sosial (Borrong, 2015).

Dalam Perjanjian Baru, ajaran Yesus mengenai perceraian menunjukkan penegasan kembali terhadap maksud Allah sejak penciptaan. Yesus mengkritik pemahaman legalistik terhadap hukum Musa dan mengarahkan perhatian kepada kehendak Allah yang asli, yaitu kesatuan dan kesetiaan dalam pernikahan (Mat. 19:3–9). Pernyataan Yesus bahwa Musa mengizinkan perceraian karena kerasnya hati manusia menegaskan bahwa perceraian bukanlah rancangan Allah, melainkan akibat dari keberdosaan manusia. Dengan demikian, Yesus mengangkat standar etika pernikahan yang lebih tinggi, yang berakar pada pembaruan hati dan kesetiaan kepada kehendak Allah (Wright, 2004).

Ajaran rasul-rasul memperkuat pandangan Yesus dengan menempatkan pernikahan dalam kerangka kehidupan baru di dalam Kristus. Rasul Paulus, misalnya, menasihati jemaat agar menjaga kesatuan pernikahan dan menghindari perceraian, sambil tetap memberikan panduan pastoral bagi situasi pernikahan yang kompleks, termasuk pernikahan campur iman (1Kor. 7). Pendekatan Paulus menunjukkan keseimbangan antara prinsip normatif dan kepekaan pastoral, di mana kebenaran Injil diterapkan secara bijaksana dalam konteks kehidupan nyata jemaat. Hal ini memperlihatkan bahwa etika Kristen tentang perceraian tidak bersifat kaku, tetapi diarahkan pada pemeliharaan iman, damai sejahtera, dan kesaksian gereja (Hays, 1996).

Dalam tradisi gereja, sikap terhadap perceraian berkembang seiring dengan refleksi teologis dan konteks historis yang berbeda. Gereja mula-mula cenderung mengambil sikap yang sangat ketat terhadap perceraian, dengan menekankan kesucian dan ketakterceraian pernikahan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, berbagai denominasi Kristen mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda, mulai dari sikap yang sangat restriktif hingga pendekatan yang lebih pastoral dan kontekstual. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan yang terus-menerus antara ideal teologis dan realitas pastoral dalam kehidupan gereja (Wright, 2004).

Pemikiran para teolog Kristen juga memperkaya diskursus tentang perceraian dalam tradisi gereja. Beberapa teolog menekankan dimensi perjanjian dan kesetiaan sebagai dasar etika pernikahan, sementara yang lain menyorotipentingnya kasih karunia dan pemulihan bagi mereka yang mengalami kegagalan relasi. Dalam konteks ini, perceraian dipahami sebagai tragedi moral yang membutuhkan respons gereja yang penuh kasih, tanpa mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Pendekatan teologis semacam ini menegaskan bahwa gereja dipanggil bukan hanya untuk menjaga norma, tetapi juga untuk menjadi ruang penyembuhan dan pemulihan bagi keluarga yang terluka (Borrong, 2015).

Dengan demikian, perspektif Alkitab dan tradisi gereja menunjukkan bahwa perceraian merupakan isu etis dan teologis yang kompleks. Alkitab secara konsisten menegaskan kesucian pernikahan dan menempatkan perceraian sebagai penyimpangan dari kehendak Allah, namun sekaligus mengakui realitas keberdosaan manusia yang menuntut pendekatan pastoral yang bijaksana. Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi gereja dalam merumuskan sikap dan pelayanan keluarga yang setia pada ajaran Alkitab, sekaligus relevan dan penuh kasih dalam konteks pelayanan konkret, termasuk di Ketapang, Kalimantan Barat (Verkuyl, 2011; Wright, 2004).

## **Analisis Teologis-Normatif terhadap Perceraian**

Dalam kerangka teologis-normatif, perceraian harus dianalisis terutama dalam terang kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Pernikahan, menurut kesaksian Kitab Suci, merupakan bagian dari tatanan penciptaan Allah yang kudus dan baik, di mana laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam ikatan perjanjian yang bersifat permanen dan eksklusif (Kej. 2:24). Kehendak Allah atas pernikahan menekankan kesatuan, kesetiaan, dan tanggung jawab timbal balik, sehingga perceraian secara normatif dipahami sebagai penyimpangan dari maksud ilahi tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif etika Kristen, perceraian bukanlah kehendak Allah yang ideal, melainkan realitas yang muncul akibat rusaknya relasi manusia dengan Allah dan sesama (Grenz, 2011).

Yesus sendiri menegaskan kembali kehendak Allah sejak penciptaan dengan menolak pemahaman legalistik terhadap perceraian. Ketika Yesus menyatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian karena kerasnya hati manusia, Ia menempatkan perceraian dalam kategori toleransi ilahi terhadap keberdosaan manusia, bukan sebagai legitimasi moral. Pernyataan ini menegaskan bahwa kehendak Allah bersifat normatif dan transenden, sementara praktik manusia sering kali mencerminkan kegagalan untuk hidup seturut kehendak tersebut. Oleh karena itu, analisis teologis-normatif memandang perceraian sebagai tanda disfungsi moral dan spiritual dalam relasi pernikahan, bukan sebagai solusi ideal atas konflik rumah tangga (Hays, 1996).

Dimensi dosa menjadi aspek penting dalam memahami perceraian secara teologis. Dosa dalam perspektif Alkitab tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai kerusakan relasi—baik relasi dengan Allah maupun dengan sesama. Perceraian sering kali merupakan akumulasi dari dosa-dosa relasional seperti egoisme, ketidaksetiaan, kekerasan, dan kegagalan dalam mengasihi secara benar. Dalam kerangka ini, perceraian mencerminkan realitas manusia yang telah jatuh dalam dosa dan tidak mampu secara sempurna mewujudkan kehendak Allah dalam relasi pernikahan (Verkuyl, 2011).

Namun demikian, etika Kristen tidak berhenti pada pengakuan akan dosa, melainkan bergerak menuju dimensi kasih karunia dan pemulihan. Kasih karunia Allah dinyatakan secara penuh dalam Yesus Kristus, yang datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia yang berdosa. Dalam terang Injil, mereka yang mengalami perceraian tidak dipandang sebagai orang-orang yang terbuang dari anugerah Allah, melainkan sebagai pribadi-pribadi yang tetap berada dalam jangkauan kasih dan pemulihan Allah. Dimensi ini menegaskan bahwa respons gereja terhadap perceraian harus

mencerminkan keseimbangan antara kebenaran normatif dan kasih karunia yang menyembuhkan (Stott, 1997).

Pemulihan dalam perspektif teologis tidak selalu berarti pengembalian relasi pernikahan secara struktural, tetapi mencakup pemulihan relasi manusia dengan Allah, pemulihan martabat sebagai gambar Allah, serta pemulihan kehidupan iman dan moral. Gereja, sebagai komunitas penebusan, dipanggil untuk menjadi ruang di mana proses pemulihan ini dapat terjadi melalui pendampingan pastoral, pengajaran, dan komunitas yang mendukung. Dengan demikian, analisis teologis-normatif menegaskan bahwa perceraian merupakan tragedi moral, tetapi bukan akhir dari karya Allah dalam kehidupan seseorang (Grenz, 2011).

Ketegangan antara ideal teologis dan realitas pastoral merupakan salah satu tantangan utama dalam etika Kristen tentang perceraian. Di satu sisi, gereja harus setia pada ajaran Alkitab yang menegaskan kekudusan dan ketakterceraian pernikahan. Di sisi lain, gereja juga berhadapan dengan realitas kehidupan jemaat yang kompleks, termasuk situasi kekerasan, penelantaran, dan penderitaan yang mendalam dalam pernikahan. Ketegangan ini menuntut kebijaksanaan pastoral agar penerapan norma teologis tidak berubah menjadi legalisme yang melukai, melainkan tetap mencerminkan kasih Kristus (Hays, 1996).

Dalam konteks pelayanan gereja, ketegangan ini tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan salah satu sisi secara ekstrem. Etika Kristen yang matang justru berusaha memelihara dialektika antara kebenaran dan kasih, antara norma dan belas kasihan. Gereja dipanggil untuk menegaskan ideal ilahi tentang pernikahan, sekaligus hadir secara empatik dan bertanggung jawab dalam mendampingi mereka yang mengalami kegagalan relasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa etika Kristen bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan refleksi iman yang hidup dan kontekstual (Stott, 1997).

Dengan demikian, analisis teologis-normatif terhadap perceraian menempatkan fenomena ini dalam kerangka kehendak Allah, realitas dosa manusia, serta kasih karunia dan pemulihan dalam Kristus. Ketegangan antara ideal teologis dan realitas pastoral tidak dihindari, tetapi diolah secara reflektif dan bertanggung jawab sebagai bagian dari panggilan gereja. Kerangka ini menjadi dasar penting bagi perumusan implikasi etika Kristen bagi pelayanan keluarga, khususnya dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat, di mana gereja dituntut untuk setia pada Firman Tuhan sekaligus peka terhadap realitas kehidupan jemaat (Verkuyl, 2011; Grenz, 2011).

## **Realitas Perceraian dalam Konteks Ketapang, Kalimantan Barat**

Realitas perceraian dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat, tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial dan budaya keluarga yang berkembang di wilayah tersebut. Ketapang merupakan daerah dengan keragaman etnis, latar belakang budaya, serta pengaruh adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pernikahan dan relasi keluarga. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit privat, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, di mana keputusan-keputusan keluarga—termasuk perceraian—sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial, nilai adat, dan ekspektasi komunitas. Perspektif ini menunjukkan bahwa perceraian bukan semata persoalan individual, melainkan fenomena sosial yang memiliki implikasi komunal bagi kehidupan jemaat (Borrong, 2015).

Secara sosial-budaya, nilai kebersamaan dan relasi kekerabatan yang kuat di masyarakat Ketapang dapat menjadi faktor pendukung sekaligus tantangan bagi keutuhan keluarga Kristen. Di satu sisi, ikatan komunal dapat berfungsi sebagai sistem pendukung bagi pasangan suami-istri yang mengalami konflik. Namun, di sisi lain, tekanan dari keluarga besar atau adat tertentu dapat memperkeruh konflik rumah tangga, terutama ketika nilai adat tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika Kristen tentang pernikahan. Ketegangan antara nilai Injil dan nilai budaya ini sering kali menempatkan pasangan Kristen dalam dilema etis yang kompleks, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian jika tidak ditangani secara bijaksana (Bevans, 2002).

Selain faktor budaya, tantangan ekonomi menjadi salah satu faktor signifikan yang memengaruhi stabilitas pernikahan di Ketapang. Keterbatasan lapangan kerja, ketidakstabilan pendapatan, dan tekanan ekonomi rumah tangga sering kali memicu konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi relasi emosional dan spiritual dalam keluarga. Ketika tekanan ini tidak diimbangi dengan kedewasaan iman dan dukungan pastoral yang memadai, konflik ekonomi dapat berkembang menjadi krisis relasi yang berujung pada perceraian (Verkuyl, 2011).

Faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam realitas perceraian di konteks lokal. Tingkat pendidikan yang terbatas dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam mengelola konflik, berkomunikasi secara sehat, dan memahami makna teologis pernikahan Kristen. Kurangnya pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga di gereja semakin memperbesar risiko terjadinya perceraian, karena pasangan tidak diperlengkapi secara memadai untuk menghadapi tantangan pernikahan. Dalam perspektif etika Kristen, kondisi

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif gereja dan praksis pembinaan jemaat yang konkret (Stott, 1997).

Nilai adat setempat juga turut memengaruhi cara pandang terhadap perceraian. Dalam beberapa konteks, adat dapat memberikan sanksi sosial terhadap perceraian, tetapi dalam konteks lain justru menyediakan mekanisme adat yang mempermudah pemutusan relasi pernikahan. Ketika nilai adat lebih dominan daripada nilai teologis, perceraian berisiko dipandang sebagai solusi pragmatis atas konflik, bukan sebagai persoalan etis dan spiritual yang serius. Situasi ini menuntut gereja untuk melakukan dialog kritis dengan budaya setempat, agar nilai-nilai Injil dapat dihadirkan secara kontekstual tanpa kehilangan integritas teologisnya (Bevans, 2002).

Dampak perceraian terhadap kehidupan jemaat di Ketapang sangat nyata dan multidimensional. Perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga anak-anak, keluarga besar, dan komunitas gereja. Anak-anak dari keluarga bercerai sering kali mengalami luka psikologis dan spiritual yang berdampak pada pertumbuhan iman mereka. Sementara itu, jemaat gereja dapat mengalami ketegangan relasional, stigma sosial, dan kebingungan etis dalam menyikapi kasus perceraian yang terjadi di tengah komunitas iman. Kondisi ini menuntut kehadiran gereja sebagai komunitas yang mampu merespons perceraian dengan kebenaran, kasih, dan tanggung jawab pastoral (Borrong, 2015).

Dalam terang etika Kristen, realitas perceraian di Ketapang menantang gereja untuk tidak hanya mengulangi norma teologis secara abstrak, tetapi juga mengembangkan pelayanan keluarga yang kontekstual dan transformatif. Gereja dipanggil untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang memengaruhi keluarga jemaat, sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan nyata umat. Pendekatan ini sejalan dengan panggilan etika Kristen yang bersifat inkarnasional, yakni menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah secara konkret di tengah realitas kehidupan manusia (Stott, 1997).

Dengan demikian, realitas perceraian dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat, menunjukkan kompleksitas persoalan keluarga Kristen yang tidak dapat disederhanakan. Perceraian muncul sebagai hasil interaksi berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual. Pemahaman kontekstual terhadap realitas ini menjadi landasan penting bagi gereja dalam merumuskan implikasi etika Kristen dan strategi pelayanan keluarga yang relevan, setia pada Firman Tuhan, serta peka terhadap konteks kehidupan jemaat (Verkuyl, 2011; Bevans, 2002).

## **Implikasi Etika Kristen bagi Pelayanan Keluarga**

Etika Kristen tentang perceraian tidak hanya berhenti pada tataran refleksi teologis, tetapi menuntut implikasi praktis yang nyata dalam pelayanan keluarga gereja. Gereja, sebagai komunitas iman, dipanggil untuk menerjemahkan prinsip-prinsip etika Kristen ke dalam praksis pastoral yang membangun, memulihkan, dan memberdayakan keluarga Kristen. Dalam konteks ini, pelayanan keluarga harus berakar pada pemahaman bahwa pernikahan adalah perjanjian kudus yang dikehendaki Allah, sekaligus menyadari realitas keberdosaan manusia yang sering kali melukai relasi keluarga. Oleh karena itu, implikasi etika Kristen bagi pelayanan keluarga menuntut keseimbangan antara kebenaran normatif dan kasih pastoral (Stott, 1997).

Pendampingan pastoral keluarga merupakan implikasi utama dari etika Kristen dalam menghadapi persoalan perceraian. Pendampingan pastoral tidak hanya berfungsi sebagai sarana konseling ketika konflik telah mencapai titik krisis, tetapi juga sebagai proses pembinaan iman yang berkelanjutan. Dalam perspektif etika Kristen, pendampingan pastoral bertujuan menolong keluarga untuk memahami konflik dalam terang iman, mengelola perbedaan secara dewasa, serta membuka ruang bagi rekonsiliasi dan pemulihan relasi. Gereja dipanggil untuk hadir secara empatik dan bertanggung jawab, bukan sebagai hakim moral, melainkan sebagai komunitas yang mencerminkan kasih Kristus bagi keluarga yang sedang bergumul (Borrong, 2015).

Selain pendampingan pastoral, pendidikan pranikah dan pascanikah menjadi implikasi strategis yang tidak dapat diabaikan dalam pelayanan keluarga Kristen. Pendidikan pranikah berfungsi sebagai sarana preventif untuk menanamkan pemahaman teologis tentang makna pernikahan, komitmen, dan tanggung jawab moral sejak awal. Sementara itu, pendidikan pascanikah membantu pasangan untuk terus bertumbuh dalam iman, komunikasi, dan pengelolaan konflik sepanjang perjalanan pernikahan. Dalam perspektif etika Kristen, pendidikan ini bukan sekadar program gerejawi, tetapi bagian dari panggilan gereja untuk membentuk karakter dan spiritualitas keluarga Kristen agar mampu menghadapi tantangan hidup bersama secara setia dan bertanggung jawab (Sidjabat, 2018; Verkuyl, 2011).

Pendekatan gereja terhadap keluarga bermasalah juga harus didasarkan pada prinsip etika Kristen yang holistik. Keluarga yang mengalami konflik berat atau bahkan perceraian sering kali menghadapi stigma sosial dan penghakiman moral, baik dari masyarakat maupun dari komunitas gereja sendiri. Etika Kristen menuntut gereja untuk menghindari sikap eksklusif dan menghukum, serta sebaliknya menghadirkan pendekatan yang inklusif dan memulihkan. Gereja dipanggil untuk menciptakan ruang aman bagi keluarga bermasalah agar

mereka dapat mengalami penerimaan, pendampingan, dan pertumbuhan iman, tanpa mengaburkan kebenaran firman Tuhan tentang kekudusan pernikahan (Grenz, 2011).

Pendekatan pastoral yang etis juga menuntut gereja untuk peka terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya keluarga jemaat. Dalam konteks seperti Ketapang, Kalimantan Barat, pelayanan keluarga harus mempertimbangkan keterbatasan ekonomi, tingkat pendidikan, serta pengaruh nilai adat yang membentuk dinamika rumah tangga. Etika Kristen yang kontekstual menolong gereja untuk tidak menerapkan pendekatan seragam yang ahistoris, tetapi mengembangkan strategi pelayanan yang relevan dan membumi, tanpa kehilangan dasar teologisnya. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen transformasi yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah secara konkret dalam kehidupan keluarga jemaat (Bevans, 2002).

Lebih lanjut, implikasi etika Kristen bagi pelayanan keluarga juga mencakup pembentukan komunitas jemaat yang saling menopang. Keluarga Kristen tidak dipanggil untuk menjalani pergumulan mereka secara individual, melainkan sebagai bagian dari tubuh Kristus yang saling memperhatikan dan menanggung beban satu sama lain. Dalam komunitas seperti ini, keluarga yang rapuh tidak dibiarkan sendirian, melainkan didampingi dalam kasih dan kebenaran. Pendekatan komunal ini sejalan dengan etika Kristen yang menekankan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan yang mencerminkan kehendak Allah (Stott, 1997).

Dengan demikian, implikasi etika Kristen bagi pelayanan keluarga menegaskan bahwa gereja memiliki peran strategis dalam mencegah, menangani, dan merespons persoalan perceraian secara teologis dan pastoral. Pendampingan pastoral, pendidikan pranikah dan pascanikah, serta pendekatan yang penuh kasih terhadap keluarga bermasalah merupakan wujud konkret dari etika Kristen yang hidup dan relevan. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi gereja untuk menghadirkan kesaksian Injil yang utuh di tengah realitas keluarga yang kompleks, khususnya dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat (Verkuyl, 2011; Grenz, 2011).

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis teologis-normatif dan kontekstual yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa etika Kristen memandang pernikahan sebagai lembaga ilahi yang kudus, dimaksudkan Allah untuk mencerminkan kasih, kesetiaan, dan perjanjian yang tidak mudah diputuskan. Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, secara konsisten menempatkan pernikahan sebagai kehendak Allah yang

ideal, sementara perceraian dipahami sebagai realitas yang muncul akibat keretakan relasi manusia dengan Allah dan sesama. Dengan demikian, perceraian bukanlah tujuan ilahi, melainkan fenomena yang harus dipahami dalam terang dosa, kelemahan manusia, dan kebutuhan akan kasih karunia serta pemulihan.

Hasil pembahasan juga menunjukkan adanya ketegangan antara ideal teologis pernikahan Kristen dan realitas pastoral yang dihadapi gereja, khususnya dalam konteks Ketapang, Kalimantan Barat. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta nilai-nilai adat turut memengaruhi dinamika keluarga dan berkontribusi terhadap terjadinya perceraian di tengah jemaat. Dalam situasi ini, pendekatan etika Kristen tidak dapat berhenti pada penegasan norma, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan pastoral yang empatik, kontekstual, dan transformatif, tanpa mengabaikan kebenaran firman Tuhan.

Implikasi etika Kristen bagi pelayanan keluarga menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk berperan sebagai komunitas pemulihan yang menghadirkan kasih, keadilan, dan pengampunan Allah. Pelayanan keluarga yang kontekstual, melalui pendampingan pastoral, pendidikan pranikah dan pascanikah, serta pendekatan yang holistik terhadap keluarga bermasalah, menjadi sarana penting dalam menjaga keutuhan keluarga Kristen dan meminimalkan dampak negatif perceraian. Dengan demikian, gereja lokal di Ketapang diharapkan mampu menjalankan fungsi profetis dan pastoralnya secara seimbang, sehingga etika Kristen tentang pernikahan dan perceraian tidak hanya dipahami secara teologis, tetapi juga dihidupi secara nyata dalam kehidupan jemaat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bevans, S. B. (2002). *Models of contextual theology*. Maryknoll, NY: Orbis Books.
- Borrong, R. P. (2006). *Etika bumi baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Borrong, R. P. (2015). *Etika Kristen: Perspektif biblika dan kontekstual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Clinebell, H. (1984). *Basic types of pastoral care and counseling*. Nashville, TN: Abingdon Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Grenz, S. J. (2011). *Theology for the community of God*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
- Hauerwas, S. (1981). *A community of character: Toward a constructive Christian social ethic*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Hays, R. B. (1996). *The moral vision of the New Testament: Community, cross, new creation*. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco.

- Instone-Brewer, D. (2003). *Divorce and remarriage in the church: Biblical solutions for pastoral realities*. Carlisle, England: Paternoster Publishing.
- Sidjabat, B. S. (2018). *Mendidik warga gereja melalui Seri Selamat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Stott, J. (1997). *Issues facing Christians today* (3rd ed.). London, England: Marshall Pickering.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susabda, Y. B. (2011). *Pastoral konseling* (Vol. 1). Malang: Gandum Mas.
- Verkuyl, J. (2011). *Etika Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wright, N. T. (2004). *New Testament ethics for the people of God*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Yoder, J. H. (1994). *The politics of Jesus*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.